

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN**

DI SULAWESI SELATAN

Basri Bado¹, Syamsu Alam¹, Wahyu Muhammad Zain²

¹Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan

² Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan

ABSTRACT

Inequality is one indicator to show the level welfare as a consequence of Economic Development. The goal of this research is to identify the effect of Economic Growth, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Profit Sharing Funds towards inequality of development in South Sulawesi. This research used panel regression analysis using E-views 10. This research analyze secondary data from 2013-2017. The result of this research indicate that simultaneously variables of Economic growth, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Profit Sharing Funds simultaneously influence inequality in South Sulawesi. The t test result shows that partially economics growth, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds have a significant effect towards inequality of development in South Sulawesi.

Keywords : *Inequality, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund and Profit Sharing Funds*

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat menjadi cita-cita semua daerah. Namun, dalam banyak kasus di beberapa negara maupun daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi

tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan.

Ketimpangan pembangunan seringkali menjadi permasalahan serius dan jika tidak dapat diatasi secara hati-hati akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks. Midadan (2015) menyatakan ketimpangan pembangunan umumnya menimbulkan

masalah ekonomi, kependudukan, sosial, politik dan lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan dan tingkat pengangguran. Tanpa disadari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan masalah baru yaitu ketimpangan di daerah-daerah. Ketimpangan pembangunan tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh ketimpangan pembangunan, pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2000. Kebijakan tersebut kemudian direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 yang dipandang sebagai bagian dari upaya mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antar daerah. Di era otonomi daerah saat ini, setiap daerah dituntut untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembangunan dengan tingkat

pemerataan yang baik serta pertumbuhan. Salah satunya melalui Dana Perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana ini dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan struktur hubungan antar daerah yang membentuk interaksi saling memperlemah. Interaksi yang saling memperlemah tersebut mengakibatkan kemiskinan di wilayah pedesaan yang akhirnya mendorong terjadinya urbanisasi besar-besaran sehingga menimbulkan masalah diperkotaan seperti kawasan kumuh, kriminalitas, tingginya tingkat polusi dan sebagainya (Umiyati, 2013).

Sjafrizal (2008) menyatakan semenjak pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah dalam rangka desentralisasi pembangunan.

Mayoritas dana di daerah merupakan dana perimbangan yang kurang lebih 80 persen dari total penerimaan daerah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan dan untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data eksternal) berupa publikasi resmi instansi terkait (Badan Pusat Statistik, dll), buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta alat analisis yang digunakan yaitu:

1. Indeks Bonet

Indeks Jaime Bonet adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan menggunakan data PDRB masing-masing daerah (Kuncoro).

2. Analisis Regresi Data Panel

Dengan bentuk persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$KP = \beta_0 - \beta_1 PE_{it} - \beta_2 DAU_{it} - \beta_3 DAK_{it} - \beta_4 DBH_{it} + e$$

Keterangan:

KP = Ketimpangan Pembangunan

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

e = Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil uji menggunakan Indeks Bonet menunjukkan bahwa ketimpangan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan hampir merata pada periode 2013-2017. Sejalan dengan itu, ketimpangan di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan mendekati angka 1 yang menunjukkan semakin timpangnya Kabupaten/Kota tersebut. Dengan ketimpangan paling tinggi di Kabupaten Selayar, Barru, dan Tana Toraja. Selain itu, hanya Kota Makassar yang merupakan satu-satunya Kota dengan ketimpangan paling rendah.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan dengan tingkat kesalahan 5 persen. Koefisien regresi sebesar -0.00029, artinya jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,00029 persen.

Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pembangunan disebabkan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya Dana Perimbangan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan ketimpangan pembangunan yaitu hanya DAU dengan tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien DAU sebesar -0,00000356 yang artinya setiap kenaikan DAU sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pembangunan sebesar 0, 00000356 persen.

Berdasarkan teori Neo Klasik, ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah berbeda-beda. Menurut teori ini, ketimpangan akan berkurang dengan sendirinya karena pada tahap awal pembangunan yang dilaksanakan oleh negara berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan pada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang karena

keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Harun dan Ghazali, 2012).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya tentang ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Terjadi ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan intensitas yang hampir sama. Dengan intensitas paling tinggi di Kabupaten Selayar, Barru dan Tana toraja. Selain itu, Kota Makassar merupakan satu-satunya kota dengan intensitas paling rendah. Selain itu, ditemukan bahwa Kabupaten/Kota dengan kontribusi PDRB yang tinggi maka akan memiliki ketimpangan yang semakin rendah.

Perbedaan pertumbuhan ekonomi, proporsi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil memengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten/Kota yang akan berdampak terhadap pencapaian pembangunan di setiap daerah. Perbedaan pencapaian pembangunan inilah yang akan menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Dana Alokasi Khusus meningkatkan ketimpangan pembangunan di daerah. Hal tersebut

disebabkan salah satunya beberapa program yang ada di daerah tidak sesuai dengan program prioritas nasional.

Dana Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2017. Hal tersebut disebabkan rendahnya proporsi Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota karena hanya menerima Dana Bagi Hasil berdasarkan pemerataan.

Daftar Pustaka

- Andhiani, dkk. 2018. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera*.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016*.
- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. UI Pers Yogyakarta.
- Bakri, Syafrizal dan Hasdi Aimon. 2015. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangnya*.
- Chandra, dkk. 2017. *Dampak Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi*.
- Dodi Chandra, Syurya Hidayat dan Rosmeli. 2017. *Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi*.
- Harun, Lukman dan Ghazali Maski. 2012. *Analisis Pengaruh Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*.
- Hasdi Aimon, dkk. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulangnya*.
- Iswanto, Denny. 2015. *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*.